

Analisis penerapan pendekatan rule of reason dan state action doctrine dalam hukum persaingan usaha di Indonesia: studi putusan KPPU 09/KPPU-L/2016 dan 09/KPPU-I/2018 = The application of rule of reason approach and state action doctrine in competition law in Indonesia analysis: case study of Commission's Decision number 09/KPPU-L/2016 and 09/KPPU-I/2018

Jeremy Revadia Kristasurya, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20509342&lokasi=lokal>

Abstrak

Skripsi ini membahas mengenai penerapan pendekatan rule of reason dan state action doctrine dalam hukum persaingan usaha di Indonesia dengan menggunakan studi kasus Putusan KPPU No. 09/KPPU-L/2016 mengenai praktek monopoli yang dilakukan oleh Perusahaan Gas Negara dan Putusan KPPU No. 09/KPPU-I/2018 mengenai dugaan kartel garam industri yang dilakukan oleh 7 perusahaan importir garam pada tahun 2015. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan menggunakan studi kasus serta menggunakan teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesimpulan yang didapat adalah: 1) PGN hanya dapat melaksanakan kegiatan monopoli atau pemusatan kegiatan yang menguasai hajat hidup orang banyak apabila diatur oleh UU; 2) Rule of reason dalam kasus kartel garam sudah diterapkan dengan baik, karena KPPU telah melakukan analisis terhadap dampak terjadinya kartel kepada pasar dan konsumen. Namun dalam kasus monopoli oleh PGN, penerapan rule of reason tidak diterapkan secara maksimal. Karena penentuan harga jual yang dilakukan PGN merugikan konsumen serta tidak mempertimbangkan kemampuan daya beli konsumen; dan 3) Penerapan state action doctrine dalam kasus monopoli oleh PGN belum diterapkan secara maksimal, karena PGN tidak memiliki cukup dasar hukum untuk dapat dikecualikan dari UU No. 5 Tahun 1999.

.....This thesis discusses the implementation of the rule of reason approach and the state action doctrine in Competition Law in Indonesia, by using case studies of KPPU Decision No. 09/KPPU-L/2016 concerning monopoly practices which held by the State Gas Company (PT. PGN) and KPPU Decision No. 09/KPPU-I/2018 regarding the alleged industrial salt cartel conducted by seven salt importing companies in 2015. The applied research method for this thesis was a juridical-normative approach using case studies, theories, concepts, the principles of law, and the applicable laws and its regulations. The conclusions obtained are: 1.) PGN can only carry out monopolistic activities or concentration of activities controlling the lives of many people if regulated by the law; 2.) KPPU has implemented Rule of Reason in the salt cartel cases, by analyzing the impact of the cartel on the market and consumers. However, in the case of monopoly by PGN, the application of the rule of reason was not well-implemented, since the determination of the selling price conducted by PGN is detrimental to consumers and did not take into account the purchasing power of consumers; and 3.) The application of the state action doctrine in the monopoly case by PGN has not been well-implemented as well, as PGN does not have a sufficient legal basis to be exempted from Law No. 5 of 1999.